

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu merupakan suatu proses para memilih orang-orang berkompeten untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, yang dimana jabatan tersebut beraneka-ragam mulai dari pemilihan eksekutif dan kepala daerah serta legislatif. Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Diperkuat oleh teori dari (Gaffar ,2002 : 9) mengatakan bahwa dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menikmati pers yang bebas.

Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung, mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang per-syaratannya dan tata tata caranya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Saat ini sistem politik tidak lepas dari politik partai. Partai politik menjadi aktor utama dalam sistem yang menghubungkan antara warga dengan proses di

pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Partai politik memiliki peranan yang sangat penting di dalam setiap kegiatan sistem demokrasi. Partai politik sebagai penghubung antara warga negara dan pemerintahnya, untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik pemerintah. Partai politik sebagai suatu organisasi yang disahkan oleh negara ini diharapkan sebagai organisasi yang dapat memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan-kepentingan, memberikan jalan kompromi dalam persaingan pendapat. Pada umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir, yang anggota - anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai - nilai serta cita - cita yang sama, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya (Budiardjo, 2015 : 422).

Partai politik telah di sahkan pada 15 januari 2011 pemerintah mengesahkan UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008, itu artinya memperkuat partai politik sebagai bagian dari kesatuan sistem politik di Indonesia dan setiap aktifitas politik di indonesia tak luput kepartaian berkecimpung di dalamnya. Sedikit menjelaskan kembali pada referensi berbeda mengenai definisi partai politik (Septiadi dan Kolip, 2013 : 277) partai politik merupakan sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijaksanaan umum yang mereka susun ". Dalam arena pemilihan umum, partai politik memegang peranan penting dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpinnya, dalam hal ini partai politik menjadi sarana bagi lahirnya calon-calon pemimpin yang diharapkan memiliki integritas, kompetensi, serta memiliki kecakapan dalam memimpin suatu wilayah. Selain itu partai juga ada dalam setiap dinamika politik lokal, dimana proses rekrutmen kepala daerah juga ditentukan oleh partai politik. Dari pemamparan tersebut rekrutmen politik menjadi penting untuk di kaji dalam studi ilmu politik.

Partai politik sebagai organisasi yang memiliki fungsi rekrutmen politik, dalam Undang-undang No.2 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 pun telah di jelaskan tentang fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi seperti rekrutmen politik sangat dibutuhkan, kegiatan tersebut juga di sahkan oleh pemerintah karena partai politik adalah salah satu organisasi yang boleh berpartisipasi dalam sistem pemilu. Selain itu rekrutmen menjadi menarik untuk dikaji karena dapat menjelaskan banyak hal dari dinamika partai politik (Sigit Pamungkas, 2009). Rekrutmen politik dapat menggambarkan peran dan fungsi partai politik dalam kegiatan seperti pemilu. Rekrutmen politik juga dapat menggambarkan karakter dari setiap partai politik, dalam hal ini mengenai ideologinya, kapasitas, serta pengalaman politik pada partai itu sendiri.

Rekrutmen partai politik menurut pemaparan referensi dari (Budiardjo, 2015 : 408) “fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena dengan adanya kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.”. Pada pernyataan diatas rekrutmen politik merupakan peranan partai politik yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas pada kepentingan internalnya partai butuh kader-kader yang berkualitas, dengan memiliki kader berkualitas bagi partai tersebut akan memiliki kesempatan perkembangan partai untuk keberlangsungan partai tersebut, dan lagi jika partai tersebut memiliki kader-kader yang berkualitas, maka partai tidak akan sulit untuk menentukan pemimpinnya, yang nantinya masuk dalam bursa calon kepemimpinan nasional. Apabila kekuasaan untuk memerintah diperoleh partai, maka partai berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Eksistensi pada partai politik merupakan suatu

tanda bahwa partai harus berlomba-lomba menampilkan politisi-politisi terbaiknya hal tersebut akan sangat bergantung sekali pada fungsi rekrutmen ini. Perkembangan politik di daerah saat ini mengalami perubahan kemajuan yang luar biasa sejak diputuskannya otonomi daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sesuai peraturan Undang-undang yang dibuat saat era reformasi. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 keadaan semakin kompetitif dan berpeluang terbuka, rakyat juga sudah semakin cerdas dan semakin mempertanyakan kinerja kepala daerah yang terdahulu sehingga mereka bersifat objektif, sikap partai politik semakin terbuka, pragmatisme dari partai politik ditandai dengan banyaknya figur calon yang bukan dari kader partai turut mencalonkan agar diusung oleh partai. Hal tersebut juga sebagai kesempatan untuk partai memperluas basis pemilih serta melihat peluang menang. Dinamika politik memang selalu membuat persepsi masyarakat tentang partai politik tingkat kepercayaannya naik turun. Pada pilkada sebelumnya memang partai bersikap tertutup. Dengan menghadirkan kader-kader terbaiknya yang ditempa melalui pendidikan politik dalam partai. Saat ini partai yang sangat terbuka pada kriteria-kriteria calon kepala daerah memperbolehkan orang non partai atau bukan kader untuk mengajukan diri untuk diusung partai.

Saat ini banyak partai yang hanya menjadi kendaraan politik, untuk persyaratan maju menjadi pemimpin daerah, dengan menghubungi partai maka mereka bisa melaju untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Disitu pasti tempat terjadinya politik transaksional, perjanjian-perjanjian antara partai dan calon-calon untuk diusung. Partai politik dan calonnya yang akan diusung sama-sama memiliki keuntungan, sehingga masyarakat hanya sebagai pemberi suara atas kepentingan politik dari partai-partai dan calon-calon tersebut, hal tersebut akan berdampak terhadap perilaku menyimpang kepala daerah terpilih yang akhirnya menyebabkan korupsi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai menurun. Tetapi hal tersebut

bisa dicegah dengan pola rekrutmen partai politik yang jujur dan adil. Berkaitan dengan hal tersebut rekrutmen politik terhadap pemilihan kepala daerah merupakan salah satu hal penting dalam menentukan pemimpin yang baik.

PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang besar dan juga memiliki tokoh-tokoh yang sudah atau sedang menduduki jabatan di daerah. Dalam proses rekrutmen partai politik juga memiliki kelemahan dan keunggulan, keunggulan PDI-Perjuangan biasanya lebih mengutamakan kader-kadernya yang berpengalaman untuk maju menjadi calon kepala daerah, contohnya pada pilkada di Jakarta yang dimenangkan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, selain itu ada gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader dari PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan yang identik dengan semboyan mengutamakan kepentingan rakyat kecil serta ideologi Nasionalisnya yang kuat itu pasti tercermin pada setiap kader-kadernya. Hal tersebut hampir sama yang dilakukan pada Partai Keadilan Sejahtera mereka juga mengajukan calon dari dalam internal partai, kader-kader yang berkualitasnya ditampilkan. Partai Keadilan Sejahtera memiliki pola yang unik dalam rekrutmen kaderisasinya, kader Partai Keadilan Sejahtera dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh guru pembimbing menggunakan metode Tarbiyah keislaman. Salah satu kepala daerah yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Kedua partai tersebut amat kuat menguasai kancah politik di daerah. Dengan ciri khas serta ideologis yang identik dari kedua partai tersebut, maka mereka memiliki masa yang besar di daerah. Melihat dari proses rekrutmen kedua partai tersebut yang menggunakan proses rekrutmen tertutup yang artinya hanya internal partai yang mengetahui proses tersebut.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri PDI-Perjuangan memenangkan 15 pilkada, seperti di kutip pada laman web metrotvnews.com, "Hasto sekjen PDI-Perjuangan Menurut Hasto, 15 daerah di Kabupaten/kota di Jatim itu merupakan basis PDIP,

yaitu kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Situbondo”. Sedangkan pada PKS, dilansir laman web beritajatim.com, sekertaris umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan menjelaskan dari hasil quick count 9 pasangan calon dari PKS meraih kemenangan, Rinciannya, kabupaten Ngawi, Lamongan, Malang, Banyuwangi, Tuban, Mojokerto dan Kota Blitar, di tujuh daerah ini PKS terlibat sebagai pengusung. Sedangkan di Kabupaten Pacitan dan Gresik, PKS terlibat sebagai pendukung.

Positifnya partai saat ini lebih terbuka, dapat dilihat dari hasil pilkada yang dijelaskan diatas tidak ada yang merupakan kader dari partai, partai hanya berperan sebagai pendukung dan pengusung pasangan calon. Fariatifnya latar belakang calon-calon yang dihadirkan oleh partai menjadi jalan untuk masyarakat lebih berfikir politis juga, dimana calon-calon yang memiliki tujuan yang sama dengan masyarakatnya yang akan dipilih. Disisi lain partai juga mengutamakan startegi untuk kemenanganya, untuk keberlanjutan posisi partai di pemerintahan. Sisi positif lain partai yang melakukan rekrutmen terbuka adalah banyak calon-calon kepala daerah yang memiliki latarbelakang berbeda bukan terlahir dari partai politik berkontribusi dalam jabatan politik daerah, calon-calon seperti ini biasanya akan lebih adil dan berfokus pada tujuannya untuk membangun daerahnya, mereka calon-calon yang dari latarbelakang berbeda juga diberikan pendidikan politik oleh partai. Pada internal partai sendiri akan memberikan keadilan dalam penentuan hak dan pendapat serta suara politik dalam organisasinya, anggota-anggotanya dilibatkan dalam proses rekrutmen, hal ini akan menimbulkan sikap demokratis dalam internal partai.

Pada PILKADA tahun 2015 di Kabupaten Jember, PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera mempersiapkan strategi politiknya. Kedua partai

melaksanakan proses rekrutmen untuk menentukan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung.

Mereka menjadi partai pengusung, kedua partai tersebut sudah dapat dilihat dari ideologis serta tujuan partai merupakan partai yang berbeda. Perbedaan pada partai politik merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, karena perbedaan tersebut akan menciptakan keberagaman politik, dan semakin banyaknya pilihan masyarakat untuk menentukan partai mana yang menjadi tujuan politik mereka. PILKADA jember kali ini, diikuti pasangan calon yang benar-benar memiliki latarbelakang yang berbeda bukan dari kader-kader partai yang sudah terlatih memahami politik. Dari hal tersebut partai-partai yang memiliki tujuan dan ideologis yang berbeda ini melakukan pola rekrutmen politik. PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang kuat dalam identitasnya, sehingga hal tersebut diikuti dengan kuatnya masa mereka tidak terkecuali di Kabupaten Jember. Dari perbedaan tersebut dan kaitan bagaimana pola partai melakukan perekrutan menjadi gambaran bahwa partai yang berasaskan Nasionalis dan Agamis ini akan memutuskan mengusung calon yang sesuai dengan pandangan mereka yang berbeda. Kondisi partai politik pada PILKADA Kabupaten Jember juga mendeskripsikan bahwa PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menghadirkan kader-kadernya untuk pencalonan, posisi kader hanya pada tahap rekomendasi partai tidak sampai pada tahap keputusan final. Mengapa demikian, hal tersebut merupakan sikap politik partai, yang akan mengusung calon-calon partai yang memiliki popularitas dimasyarakat, menurut mereka. Menurut penulis rekrutmen politik saat ini berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, positifnya seperti yang telah dijelaskan diatas, semakin berfariasinya latarbelakang calon-calon yang akan diusung partai memudahkan masyarakat memilih. Positifnya pada internal partai sebagai pihak yang melakukan rekrutmen adalah memperluas suara pemilih. Negatifnya apabila dalam kegiatan rekrutmen calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut tertutup pada

internal partai nantinya akan mengakibatkan praktek-praktek transaksional dalam pilkada. Karena figur non kader tidak didukung basis massa riil pada tingkat bawah sinkronisasi ideologis layaknya kader. Partai hanya akan menjadi kendaraan politik, dan disaana akan terjadi perjanjian-perjanjian antara elit politik.

Berdasarkan permasalahan dari latarbelakang diatas, khususnya menyangkut tentang rekrutmen politik, maka menulis akan membahas mengenai perbandingan dari salah satu fungsi dari partai politik dengan judul : *PERBANDINGAN REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP CABUP DAN CAWABUP PILKADA DI KABUPATEN JEMBER.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap calon Bupati dan Wakilnya pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai perbandingan proses rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.